



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN - DPR RI
DALAM RANGKA KEGIATAN BKSAP SDGs DAY
KE KOTA MALANG – JAWA TIMUR
01 - 03 Juni 2022**

I. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki fungsi dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Selain hal tersebut, DPR RI juga memiliki fungsi diplomasi untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan politik luar negeri. Peran diplomasi DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan politik luar negeri DPR RI dilakukan oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) yang merupakan bagian dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI. BKSAP diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan, kolaborasi dan kerja sama dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral.

Dalam hal tersebut, kontribusi aktif BKSAP pada forum-forum internasional memainkan peranan penting dalam berbagai isu global dan/atau regional. Pada tahun 2022 ini, DPR RI juga menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan sidang Inter Parliamentary Union Assembly yang ke -144 di Bali, dan akan menjadi tuan rumah untuk Parliament 20

(P20) pada tanggal 6-7 Oktober nanti, yang bertema “*Stronger Parliament for Sustainable Recovery*”. Pada level bilateral, BKSAP membuka peluang untuk memperkuat kerja sama dengan parlemen negara lain yang direpresentasikan oleh 102 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB).

Dalam menjalankan diplomasi tersebut, Parlemen, sebagai pemangku kepentingan terkait, juga mempunyai peran penting dalam mengimplementasikan agenda-agenda yang disepakati di forum-forum internasional, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). SDGs mempunyai tujuan untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mempromosikan lingkungan hidup yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, SDGs juga memberikan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat sipil, agar dapat bersinergi dan memberikan saran kepada *state-actors* dalam mensukseskan agenda SDGs.

Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, menjadi salah satu tujuan di dalam agenda SDGs tersebut (SDG 4). Untuk itulah, tujuan pendidikan pun perlu terus dijadikan tumpuan bagi pemerintah untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam era *Sustainable Development Goals* (SDGs) hingga 2030. Peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia yang adil dan inklusif juga dapat memfasilitasi pencapaian tujuan SDGs lainnya, termasuk mengurangi kesetaraan *gender* (SDG 5), dan ikutserta dalam pertumbuhan ekonomi dan (SDG 8) yang dimana sangat terdampak karena pandemi COVID-19.

Dalam menjalankan kebijakan tersebut, diplomasi DPR RI melalui BKSAP berperan strategis menjadi salah satu pemangku kepentingan terkait dalam menjalankan aktivitas diplomasi pendidikan yang inklusif. Oleh karena itu, peran diplomasi parlemen DPR RI ini perlu disosialisasikan ke kampus-kampus dan juga pemerintah daerah. Dalam kaitan tersebut, BKSAP menyelenggarakan BKSAP Day yang akan mengangkat

tema “Memperkuat Diplomasi Soft Power Parlemen melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya”.

A. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI

Pelaksanaan kunjungan kerja diplomasi parlemen BKSAP DPR RI ke Kota Malang, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 1 – 3 Juni 2022, didasarkan pada surat tugas DPR RI Nomor: 23/D/ST-PD.DN/BKSAP-KSB/5/2022 tanggal 12 Mei 2022.

B. DELEGASI

Delegasi yang hadir pada pelaksanaan BKSAP SDGs Day di Kota Malang, adalah sebagai berikut:

NO	N A M A	NOMOR ANGGOTA	FRAKSI	KOMISI
ANGGOTA				
1	Dr. H. Mardani Ali Sera, M. Eng	A - 422	PKS	II
2	Ir. H. A. Hafisz Tohir	A - 487	PAN	XI
3	Didi Irawadi Syamsuddin, SH.,LL.M	A - 546	PD	XI
4	Arzeti Bilbina, SE., M.AP.	A - 32	PKB	IX
5	Hj. Sakinah Al Jufri, S.Ag	A – 456	PKS	X

C. VISI DELEGASI

Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI melalui BKSAP Day merupakan salah satu agenda penting sebagai sarana memperkenalkan konsep dan implementasi diplomasi parlemen kepada khalayak publik, termasuk kampus atau universitas di Indonesia. Selain itu, melalui agenda ini, BKSAP menjalin komunikasi untuk mendapat masukan dan rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait di daerah untuk disuarakan BKSAP di forum-forum internasional ataupun secara bilateral.

Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Mensosialisasikan BKSAP sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) beserta fungsinya dalam memainkan peran politik luar negeri Indonesia.

- Mensosialisasikan diplomasi parlemen, perkembangan, dan pencapaiannya yang dilakukan BKSAP dalam kerangka memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.
- Membangun sinergi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait di daerah, termasuk akademisi dalam mendukung konsep diplomasi yang bersifat multipihak.
- Mengidentifikasi tantangan dan peluang diplomasi *soft power* untuk mendukung pendidikan yang inklusif dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama di tengah pandemic COVID-19.

D. MISI DELEGASI

- Membangun sinergi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan di daerah dalam mendukung pengembangan konsep diplomasi multi-pihak.
- Mendorong peningkatan partisipasi berbagai kalangan dalam memahami kepentingan Indonesia di dunia internasional.

E. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Materi yang dijadikan referensi bagi Wakil Ketua BKSAP DPR RI diolah oleh Tenaga Ahli dan Sekretariat KSB BKSAP berupa paparan mengenai pentingnya mensosialisasikan diplomasi DPR RI dan Civitas Akademika beberapa universitas di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur serta membangun sinergi dan kolaborasi untuk mendukung pengembangan potensi daerah dalam konteks kawasan dan global. Sekretariat KSB juga melakukan komunikasi yang intensif dengan jajaran Pemkot Malang agar acara BKSAP SDGs Day dapat berjalan lancar.

II. ISI LAPORAN

A. AGENDA

PUKUL	ACARA	KETERANGAN
Kamis, 2 Juni 2022		
07.30	Sarapan pagi	
09.00	Menuju Kantor Walikota Malang	
09.30	Sekretariat KSB BKSAP tiba di Kantor Walikota (persiapan acara)	
13.30	Anggota delegasi BKSAP DPR RI tiba di kantor Walikota (menunggu di holding room)	Kantor Walikota Malang
14.00 – 16.00	Pertemuan fisik dan virtual dengan: - Walikota beserta jajarannya; - Rektor, Dekan Universitas Brawijaya Malang beserta jajaran dan mahasiswa/mahasiswa (fisik) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; - Rektor, Dekan Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran dan mahasiswa/mahasiswa (fisik) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Acara : 1. Sambutan dari Walikota 2. Sambutan dari Rektor 3. Paparan dari Ketua Delegasi 4. Tanya Jawab	Ruang Sidang Balaikota
17.00	Acara Selesai	

Pelaksanaan kegiatan BKSAP Day diselenggarakan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 01-03 Juni 2022. Sehubungan dengan ini, acara pada tepatnya dilangsungkan di Ruang Sidang, Balaikota Malang.

Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka atau secara luring dengan format sosialisasi/diskusi interaktif dengan melibatkan Pimpinan dan Anggota BKSAP dan dihadiri oleh Walikota Malang dan Wakil Walikota Malang beserta jajarannya, serta

mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan perwakilan Rektor dari Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang.

B. JALANNYA PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan susunan acara. Kemudian dilanjutkan paparan oleh Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji, dan Wakil Ketua BKSAP, Dr. H. Mardani Ali Sera, M. Eng. Acara juga diakhiri dengan sesi dialog dengan para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang, diantara peserta yang hadir lainnya.

- **Pembukaan oleh Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji**



Pada pembukaan acara, Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji memaparkan bagaimana membumikan agenda SDGs di kota Malang. Dalam hal ini, Walikota Malang menjelaskan bahwa Kota Malang mempunyai visi untuk tahun 2018-2023, termasuk menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar

lainnya bagi semua warga; mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan; mewujudkan kota yang rukun dan toleran berazaskan keberagaman dan keberpihakan masyarakat rentan dan gender; dan memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan yang tertib hukum, profesional dan akuntabel.

Selain itu, Walikota Malang juga menyampaikan beberapa tantangan dalam mencapai SDGs, seperti:

- Integrasi dalam lingkup desentralisasi, termasuk dinamika batas kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pusat
- Menguatkan kolaborasi sumber daya, seperti pentingnya penguatan hexahelix ditengah dunia yang makin cepat bergerak dalam disrupsi digital, dan keterbatasan sumber daya. Daya saing antar daerah perlu lebih dilihat dalam paradigma Kolaboratif,
- Menjaga Keberlanjutan Pasca lahirnya berbagai inisiatif baik dari berbagai daerah. Berbagai pembelajaran dan tata kelola pemerintahan yang makin baik, lincah dan reformatif menjadi kunci.



Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji menjabarkan bahwa kota Malang melakukan berbagai terobosan untuk setiap tujuan dari SDGs, termasuk pengentasan kemiskinan struktural dan perlindungan sosial yang dimana memiliki relasi kuat dalam upaya pencapaian SDGs Nomor 1. Angka Kemiskinan Kota Malang terendah kedua di Jawa Timur, yaitu 4,62%. Inisiatif kota Malang, termasuk:

- Rintang Kasih dan berbagai skema bantuan sosial
- Beasiswa Bagi Siswa SMA dan Mahasiswa Berprestasi dr Keluarga Kurang Mampu
- Pelatihan dan Bimbingan Kerja Bedah Rumah
- Gerakan Seribu (Gerbu ASN)
- Kampung Sakinah (dg Kemenag)

Adapun tantangan untuk mencapai SDGs yang dijelaskan lebih lanjut oleh Drs. H. Sutiaji, seperti efek pandemi yang masih terasa terhadap ekonomi kota dan penguatan

ketersediaan dan akurasi pendataan untuk menyelesaikan isu di level kerak kemiskinan.



Drs. H. Sutiaji juga menjabarkan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Kota Malang demi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan (SDG 8), yang dimana usaha mikro kecil dan menengah berperan sebagai aktor utama.

Dalam hal tersebut, program seperti penguatan peran UMKM dan PBJ pemerintah telah menjadi komitmen Kota Malang. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) secara elektronik yang dilakukan oleh Pemkot Malang melalui portal Jatim Bejo yang pro usaha mikro dan kecil per 30 Desember 2021 menjadi yang tertinggi di Jawa Timur. Total jumlah transaksi se-Jatim selama 2021 tercatat sebanyak 15.527 transaksi. Kota Malang berkontribusi sebanyak 17,69% dari total jumlah transaksi tersebut.

Selain itu, langkah penguatan peran UMKM lokal dijabarkan melalui SE Wali Kota Malang, No. 5 Tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh PD dan BUMD diminta memprioritaskan UMKM dan pelaku Ekraf Kota Malang. Pembinaan dan

fasilitasi pengajuan NPWP bagi UMKM dan pelaku Ekraf juga menjadi salah satu tindakan yang diambil oleh Pemkot Malang.

Dalam pembahasan pokok atau inti dari topik BKSAP SDGs Day, Drs. H. Sutiaji menjelaskan inisiatif lokal dalam bidang pendidikan (SDG 4) Kota Malang, termasuk:

- Penguatan kurikulum berorientasi pendidikan karakter;
- Pembangunan infrastruktur pendidikan dan pemerataan kualitas tenaga pendidikan;
- Beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa kurang mampu;
- Digitalisasi, standarisasi dan inovasi layanan perpustakaan, termasuk layanan pojok braille;
- Pendidikan pra-nikah dan pasangan baru menikah (Sekolah Kartini)

Akan tetapi, tantangan yang dihadapi oleh Kota Malang masih ada dalam dunia pendidikan, yaitu:

- Penetrasi internet memang semakin makin tinggi akan tetapi literasi masyarakat rendah
- Transformasi paradigma pendidikan dari mindset tesktual ke factual

Sehubungan dengan hal tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang Tertinggi Kedua se-Jawa Timur, yang setidaknya sebesar 82,04%.

Kota Malang juga disebut merupakan Kota yang responsif akan gender. Dalam 4 tahun terakhir, suara perempuan dalam pembangunan makin didengar dengan adanya musrenbang khusus perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) terus meningkat ditengah pandemi. Menjadi bukti empirik bahwa upaya pembangunan manusia makin memperhatikan kesetaraan gender. Selain itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2020 Kota Malang Jatim Indonesia sebesar 78,06%.

Kota Malang juga untuk pertama kalinya berhasil meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) atas komitmen dan peran dalam mewujudkan pengarusutamaan gender.

Dalam penutupannya, Drs. H. Sutiaji juga menyampaikan bahwa momentum baik harus dimanfaatkan dengan sinergi seluruh *stakeholders* – dan dalam hal ini, kolaborasi penting untuk melahirkan akselerasi menuju kebangkitan bersama, termasuk antar termasuk antar masyarakat, pemerintah, akademisi, dunia usaha, perbankan jasa keuangan dan juga media (*Hexa-Helix approach*).

▪ **Paparan oleh Wakil Ketua BKSAP, Dr. Mardani Ali Sera, M. Eng.**

Dalam paparannya, Dr. Mardani Ali Sera selaku wakil ketua BKSAP pertama-tama menjelaskan tugas dan fungsi DPR RI secara luas, termasuk dalam kerangka dan bidang diplomasi luar negeri. Dalam hal ini, diplomasi parlemen mendukung upaya pemerintah dalam memenangkan persaingan global dan mencapai kepentingan nasional yang bersifat komplemen atau menciptakan sinergi yang positif dalam kerangka *multitrack diplomacy*.



Lebih lanjut, Wakil Ketua BKSAP tersebut menyampaikan bahwa BKSAP, dalam forum-forum internasional maupun dalam fokus parlemen secara internal, mempunyai area sasaran diplomasi, seperti Perubahan Iklim, Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development), Perdamaian dan Keamanan, Demokrasi dan HAM, Disrupsi Digital, Krisis Kemanusiaan, dan Perdagangan Internasional. Secara bilateral, BKSAP DPR RI telah menjalin kerjasama dengan 102 negara melalui kehadiran Grup Kerjasama Bilateral (GKSB). Sedangkan pada level regional, BKSAP aktif pada forum-forum regional di tingkat Asia Tenggara, Asia, Asia Pasifik seperti Asian Parliamentary Assembly (APA), Asian Pacific Parliamentary Forum (APPF), ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA). Sama halnya dalam kerangka multilateral. Parlemen menjalin persahabatan dan kerja sama multilateral melalui Organisasi Internasional Seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of OIC Member Countries (PUIC), dan GOPAC.



Sebagai tambahan, pada tahun 2022 ini, Indonesia memegang Presidensi G20. Sebagai mitra pemerintah, Parlemen juga turut serta menyukseskan G20 dengan menjadi tuan rumah persidangan *Parliamentary 20 (P20)*. Pertemuan para wakil Parlemen antar negara G20 tersebut direncanakan akan diselenggarakan di Gedung DPR RI, pada tanggal 6 – 7 Oktober 2022. Tema besar yang akan diangkat adalah “*Stronger Parliament for Sustainable Recovery*”, sesuai dengan tema besar G20 yang menekankan upaya bersama untuk bangkit dan pulih dari pandemi, baik aspek kesehatan ataupun ekonomi.

Dr. Mardani Ali Sera juga menyampaikan inti dari presentasinya tersebut, bahwa Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target, adalah upaya komunitas internasional untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Salah satu dari tujuan dan agenda dari SDGs adalah Pendidikan Berkualitas (SDG No.4). Dalam hal ini, pendidikan yang berkualitas harus menginkorporasi prinsip dan standar HAM, yaitu aksesibilitas, kualitas, dan bersifat non-diskriminatif.

Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas sebagai Lembaga Pendidikan tinggi melaksanakan penelitian/riset sebagai bagian dari kewajiban Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam hal ini, Parlemen dapat menerima masukan berupa hasil penelitian/riset ataupun *best practices* sebagai penguatan tugas Parlemen (Legislasi, Anggaran, Pengawasan, dan juga Diplomasi). Hasil penelitian/riset tersebut dapat disuarakan sebagai terobosan/inovasi bagi berbagai persoalan global dan nasional, yang dapat diimplementasikan di dalam negeri, ataupun secara bilateral dan multilateral.

Peneliti universitas, guru dan mahasiswa bekerja dalam kemitraan dengan warga negara dan sektor swasta dan publik, bersama-sama menciptakan pengetahuan yang dapat menghasilkan solusi. Kombinasi misi inti inilah yang memberi universitas tempat unik dalam upaya bersama untuk mencapai SDGs ataupun agenda lainnya.

Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, Dr. Mardani Ali Sera dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa DPR RI mempunyai tugas dalam kebijakan dan dukungan regulasi, alokasi anggaran dan pengawasan terhadap kebijakan ataupun program pemerintah mengenai pendidikan, dan juga memantau pelaksanaan itu (contohnya: melalui Komisi X dengan, diantara lainnya, mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi).

Sehubung dengan tugas dan fungsi DPR RI secara menyeluruh dalam bidang regulasi, pengawasan dan memperjuangkan kesetaraan dalam pendidikan di dalam forum-forum internasional contohnya melalui mengajukan dan mengadopsi resolusi, BKSAP juga mempunyai peran dalam mempromosikan *attractiveness* yang dimiliki oleh Lembaga Pendidikan di Indonesia.

Parlemen juga dapat menjadi jembatan untuk universitas yang ada di Indonesia agar bisa kolaborasi dan riset dengan universitas yang ada di luar negeri – dan disinilah *international recognition* dapat dicapai. Selain itu, Parlemen dapat mendorong pertukaran mahasiswa untuk *transfer dan increase knowledge* dan mendapatkan *experience* dalam pertukaran budaya. Yang tidak kalah pentingnya adalah, Parlemen juga dapat sambungkan bagian mana para mahasiswa yang ingin magang di luar negeri itu dapat mempunyai jaringan, dengan pemerintah negara lain.

Dengan mengimplementasikan hal-hal tersebut, kami yakin Parlemen dapat membantu memperkuat SDM Indonesia, yang juga akhirnya menciptakan inovasi dan ide baru, dan membuka lapangan pekerjaan yang luas.

C. RANGKUMAN SESI DIALOG

Selanjutnya dilakukan sesi dialog dengan para civitas akademika, termasuk mahasiswa dan mahasiswi yang hadir dalam pertemuan BKSAP SDGs Day.



Mahasiswa Universitas Brawijaya, M. Nurkholis Mahendra, berharap akan terus ada perubahan-perubahan yang signifikan di bidang pendidikan, utamanya di level perguruan tinggi, dan yang dipaparkan oleh para anggota DPR RI bisa terealisasi secara maksimal. Tugas dan fungsi DPR RI menjadi sangat penting, terutama dalam bidang alokasi anggaran untuk pendidikan.



Anggota BKSAP Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag., dalam pembukannya, menyampaikan pendapat bahwa adab itu diatas ilmu, dan harus yang menjadi aspek yang perlu diketahui oleh setiap mahasiswa. Selain itu, sebagai Anggota DPR RI di Komisi 10 yang membidangi pendidikan, DPR RI akan terus memperjuangkan aspirasi mahasiswa di dalam tugas-tugasnya, termasuk dengan adanya Panitia Kerja (Panja) yang membidangi pendidikan. Panja seperti seperti Panja Peta Jalan Pendidikan (PJP) dapat memberikan rekomendasi kepada program-program pemerintah, yang dimana rekomendasi tersebut termasuk dari stakeholders terkait, seperti mahasiswa/mahasiswi.



Selanjutnya, Wakil Ketua BKSAP, Ir. H. Achmad Hafisz Tohir memberikan contoh baik beberapa negara seperti Turkiye dalam bidang pendidikan. Beliau menyampaikan bahwa beberapa perpustakaan di negara tersebut sangat diperhatikan oleh Negara, dan masyarakat difasilitasi dengan baik, yang dimana membuat masyarakat giat akan belajar dan menambah ilmu di dalam perpustakaan. Sang Wakil Ketua BKSAP juga menyampaikan peran penting dari LPDP untuk pendidikan dan juga pentingnya pengentasan kemiskinan (SDG 1) di dalam negeri yang dimana dapat sangat berkontribusi pada pendidikan (SDG 4).



Anggota BKSAP Komisi 11, Didi Irawadi Syamsuddin, SH.,LL.M, juga menyampaikan bahwa indonesia mempunyai *resources* yang kuat dalam bidang ekonomi, dan mempunyai kepulauan dan pertanian. Hal tersebut harus dibantu oleh pendidikan yang merata, karena ekonomi dan pendidikan merupakan dua aspek yang tidak bisa dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut, mahasiswa mempunyai peran yang kuat untuk memajukan ekonomi di Indonesia.



Anggota BKSAP yang juga menjabat sebagai anggota Komisi 9 DPR RI yang membidangi kesehatan, Arzetti Bilbina, S.E., M.A.P., menyampaikan adanya hubungan pendidikan dengan kesehatan. Tanpa adanya Kesehatan, pendidikan akan juga terganggu, seperti apa yang terjadi disaat pandemi COVID-19. Maka dari itu, vaksin COVID-19 dosis ke-III atau booster harus dipercepat pemberiannya di seluruh negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, Arzetti mengapresiasi kota-kota di Jawa Timur, seperti kota Malang dan Surabaya yang telah bergerak cepat melaksanakan vaksin dosis ke-III untuk warganya.

III. KESIMPULAN DAN SARAN



A. KESIMPULAN

- Melalui acara BKSAP SDGs Day, BKSAP DPR RI dapat mensosialisasikan fungsi dan tugas DPR RI, termasuk dalam kerangka diplomasi luar negeri, kepada berbagai pihak terkait di Kota Malang, Jawa Timur seperti Walikota Malang, civitas akademika, serta mahasiswa dan mahasiswi.
- Secara substantif, pelaksanaan BKSAP SDGs Day berhasil menjaring banyak aspirasi yang dapat dijadikan referensi diplomasi antar parlemen. Beberapa point penting yang muncul antara lain pentingnya pendidikan yang bersifat inklusif dan merata; dan perlunya pelibatan mahasiswa dan pemerintah daerah.
- Delegasi BKSAP DPR RI sangat mengapresiasi keterlibatan aktif para peserta BKSAP SDGs Day dan tentu akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan pada saat pertemuan BKSAP SDGs Day.

B. SARAN

- Menindaklanjuti berbagai aspirasi dari berbagai pihak terutama civitas akademika di Kota Malang, Jawa Timur mengenai pendidikan. Hal tersebut dapat diperjuangkan dan dilaksanakan di dalam kerja komisi DPR RI yang bersangkutan, dan juga dalam forum-forum internasional.
- BKSAP tentunya dapat menjembatani kepentingan daerah dalam hal ini pendidikan di Kota Malang dengan *stakeholders* lain, termasuk menerima masukan berupa hasil penelitian/riset ataupun *best practices* sebagai penguatan tugas Parlemen yang dapat disuarakan sebagai terobosan/inovasi di forum-forum internasional.



IV. PENUTUP

A. ANGGARAN

Biaya yang digunakan untuk melakukan perjalanan 5 (lima) orang Anggota DPR RI, 7 (tujuh) orang Staf Bagian Kerja Sama Bilateral Sekretariat Jenderal DPR RI, 2 (dua) orang wartawan pemberitaan Parlemen dan 1 (satu) orang Tenaga Ahli BKSAP adalah sebesar Rp. 136.286.000,- (Seratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran berupa Dokumentasi dan Liputan media elektronik:

- Bahan Paparan dan Liputan (Appendix I dan Appendix II)
- Dokumentasi
- Link Liputan Media Sosial:
 - https://www.instagram.com/p/CeVD2zIviu0/?utm_source=ig_web_copy_link
 - https://www.instagram.com/p/CeTvRw2P0PC/?utm_source=ig_web_copy_link
 - <https://dpr.go.id/berita/detail/id/39099/t/BKSAP+Apresiasi+Kota+Malang+Jalan+SDG%27s+dengan+Optimal>
 - <https://dpr.go.id/berita/detail/id/39106/t/Hafizs+Thohir%3A+Politik+Anggaran+yang+Bijak+Penting+untuk+Peningkatan+Pendidikan>

C. KATA PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan BKSAP Day DPR RI di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 01 s.d. 03 Juni 2022, disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas nama delegasi, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada delegasi untuk melaksanakan tugasnya pada bidang diplomasi. Semoga bermanfaat bagi rakyat Kota Malang.

Jakarta, 9 Juni 2021

Ketua Delegasi



Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng.

APPENDIX I

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39099/t/BKSAP+Apresiasi+Kota+Malang+Jalankan+SDG%27s+dengan+Optimal>

BKSAP Apresiasi Kota Malang Jalankan SDG's dengan Optimal

03-06-2022 / B.K.S.A.P.

SHARES



Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera memimpin pertemuan BKSAP di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (2/6/2022). Foto: Bianca/nvl

Parlemen memiliki peran yang besar di tengah kemudahan dan cepatnya akses informasi, sebagaimana pemerintah dalam menjadi penghubung antar masyarakat global melalui pendidikan dan pertukaran kebudayaan. Untuk itu, sebagai sarana memperkenalkan konsep dan implementasi diplomasi parlemen kepada khalayak publik, termasuk kampus, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyelenggarakan SDG's Day dengan tema "Memperkuat Diplomasi Soft Power Parlemen Melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya", di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (2/6/2022).

SHARES



Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera mengapresiasi Pemerintah Kota Malang yang telah menjalankan 17 Sustainable Development Goals (SDG's) dengan optimal. "Kami bahagia datang ke Kota Malang. (Ada) 300 ribu lebih mahasiswa dari 57 perguruan tinggi betul-betul menjadi tempat yang subur bagi menumbuhkan iklim pertukaran budaya dan pendidikan," kata Mardani usai memimpin pertemuan BKSAP dengan Wali kota Malang Sutiaji, Wakil Wali kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, jajaran Pemkot Malang, perwakilan akademisi dan mahasiswa Universitas Brawijaya, serta perwakilan akademisi dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.

Mardani menambahkan, dari 17 poin SDG's, Pemkot Malang termasuk salah satu kota yang advance dan dapat menjadi inspirasi serta percontohan bagi daerah-daerah lain dalam mewujudkan aspek-aspek SDG's. "Mulai dari indeks pembangunan manusia yang tertinggi kedua setelah Surabaya, sampai musrenbang nya bahkan tematik ada buat lansia, anak muda, difabel, termasuk perempuan, masuk tadi terobosan untuk UMKM ke dalam program belanja dari Pemda," imbuh Anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Terakhir, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap adanya link and match antara lulusan pendidikan tinggi dengan kebutuhan pekerjaan yang ada saat ini. Sehingga, lulusan perguruan tinggi utamanya di Malang sebagai salah kota pendidikan dengan 57 kampus, dapat terserap dengan baik di masyarakat. "Pak Wali Kota punya banyak ide besar termasuk menjadikan Malang destinasi halal, kemudian juga kualitas pendidikan yang tadi *link and match*, termasuk menurut saya yang paling penting adalah tadi bagaimana betul-betul kota ini hadir untuk membahagiakan warganya," tutupnya.



Dalam kesempatan yang sama, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Brawijaya M. Nurkholis Mahendra yang menjadi salah satu peserta SDG's Day berharap akan terus ada perubahan-perubahan yang signifikan di bidang pendidikan, utamanya di level perguruan tinggi. "Semoga apa yang sudah dipaparkan bisa terealisasi secara maksimal, karena ini juga merupakan niat yang baik juga yang sudah sampaikan tadi. Besar harapan mungkin akan ada perubahan-perubahan secara signifikan demi kemaslahatan teman-teman mahasiswa terutama dalam berkuliah," harap Nurkholis. (bia/sf)

APPENDIX II



BKSAP DAY

DR. H. MARDANI ALI SERA, M.ENG
WAKIL KETUA BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN
(BKSAP) DPR RI

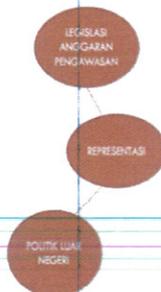
Memperkuat Diplomasi
Soft Power Parlemen
melalui Pendidikan dan
Pertukaran Budaya

1

TUGAS DAN FUNGSI DPR RI

Pasal 69 Ayat 1 dan 2 UU. 17/2014 tentang MD3:

- (1) DPR mempunyai fungsi: a. legislasi; b. anggaran; dan c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

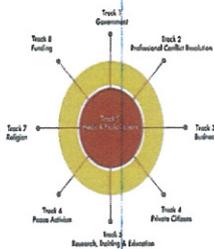


3

DIPLOMASI PARLEMEN — MULTITRACK DIPLOMACY

Beberapa Akademi HI mengategorikan diplomasi parlemen sebagai Track 2 diplomacy. Beberapa lain menyebutkannya sebagai Track 1 ½ Diplomacy karena parlemen merupakan bagian institusi resmi negara sekaligus mewakili dan mendengar aspirasi masyarakat (konstituen).

Fokus dari diplomasi parlemen juga melengkapi dan menguatkan diplomasi Pemerintah.



5

LINGKUP DIPLOMASI PARLEMEN

Regional	Multilateral	Bilateral
<ul style="list-style-type: none"> Melalui Organisasi Regional Seperti ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Asian Parliamentary Assembly (APA), SEAPAC 	<ul style="list-style-type: none"> Melalui Organisasi Internasional Seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of OIC Member Countries (PUIC), G20 Speakers' Conference, GOPAC 	<ul style="list-style-type: none"> 102 Grup Kerja Sama Bilateral dengan Parlemen Negara-Negara Sahabat

7

TUJUAN BKSAP DAY



- *Mensosialisasikan BKSAP sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) beserta fungsinya dalam memainkan peran politik luar negeri Indonesia.
- *Mensosialisasikan diplomasi parlemen, perkembangan, dan pencapaiannya yang dilakukan BKSAP dalam kerangka memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.
- *Membangun sinergi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan di daerah dalam mendukung pengembangan konsep diplomasi multipihak.
- *Mengidentifikasi tantangan dan peluang diplomasi soft power untuk mendukung pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia terutama di tengah pandemi.

2

DASAR HUKUM DAN FUNGSI DIPLOMASI PARLEMEN

UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

- * Penyelenggara hubungan luar negeri terdiri dari Pemerintah dan Non-Pemerintah (Pasal 5)

UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD

- * Fungsi DPR dalam kerangka representasi rakyat (legislasi, anggaran, pengawasan) dan juga untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.

Tata Tertib DPR RI Tahun 2014 Pasal 219

- * DPR ikut berperan serta dalam upaya diplomasi dengan mendukung upaya pelaksanaan politik luar negeri pemerintah

4

BKSAP APPROACH: SOFT POWER DIPLOMACY



6

PARLIAMENTARY 20

- *Indonesia memegang Presidensi G20.
- *Parlemen juga turut serta menyaksikan G20 dengan menjadi tuan rumah persidangan Parliamentary 20 (P20).
- *Diselenggarakan pada tanggal 6 – 7 Oktober 2022.
- *Tema besar: "Stronger Parliament for Sustainable Recovery"

8

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), juga dikenal sebagai Tujuan Global, diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015

Seruan universal untuk bertindak untuk mengatasi kemiskinan, melindungi planet ini, dan memastikan bahwa pada tahun 2030 semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran.

Terdapat 17 Goals dan 169 Targets



9

SIGNIFIKANSI PENDIDIKAN TERHADAP BIDANG LAINNYA

Universitas menyediakan penelitian atau riset, pendidikan berkualitas tinggi, dan terobosan inovasi dan ide (SDG No. 4 dan 9). Universitas yang kuat adalah bagian penting dari masyarakat sipil (SDG No. 16)

OECD: orang dengan gelar pendidikan tinggi cenderung tidak menganggur (SDG No.8) dan berpenghasilan rata-rata 54% lebih banyak daripada mereka yang hanya menyelesaikan pendidikan menengah atas.

Pendidikan menciptakan employers baru, yang dapat membuat lapangan pekerjaan baru

Meningkatkan kualitas, daya saing, dan peningkatan kesiapan SDM.

11

PENDIDIKAN BERKUALITAS – SDG NO. 4



Aksesibilitas

- Semua dan prasarana yang memadai dan terjangkau masyarakat luas
- Keterjangkauan dari sisi biaya

Kualitas

- Kurikulum yang kuat, relevan dan aktual
- Terakreditasi

Daya Saing

- Peningkatan pendidikan dan budaya

10

PERAN RISET UNTUK PARLEMEN

Universitas sebagai Lembaga Pendidikan tinggi melaksanakan penelitian/riset sebagai bagian dari kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi

Parlemen menerima masukan berupa hasil penelitian/riset sebagai penguatan tugas Parlemen (Legislasi, Anggaran, Pengawasan, Diplomasi).

Dunia internasional menerima dan mengenal hasil penelitian/riset, yang hasilnya mendapatkan *International Recognition*

12

PARLEMEN DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI DAN PENCAPAIAN SDG NO.4

Kebijakan dan Dukungan Regulasi

Alokasi Anggaran dan Pengawasan

Monitoring Pelaksanaan

13

(CONT.) PARLEMEN DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI DAN PENCAPAIAN SDG NO.4

Memperjuangkan kesetaraan dalam pendidikan di dalam forum-forum internasional

Mempromosikan *attractiveness* yang dimiliki oleh Lembaga Pendidikan di Indonesia, yaitu unsur-unsur yang menjadi daya tarik khas Indonesia di mata Internasional.

Mendorong terciptanya peluang kerja sama dalam bidang Penelitian/ Riset/ Inovasi bagi berbagai persoalan Global

Mendorong pertukaran mahasiswa untuk meningkatkan wawasan global

14

TERIMA KASIH

15